

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul

Setelah beberapa lama Kabinet *Al-Wihdah Al-Wathaniyyah Palestina* yang di bentuk dari 2 faksi besar di Palestina harus menemui jalan buntu, pemerintahan yang terbentuk pada 24 Maret 2007 memang telah di prediksi tidak berumur panjang. Namun sangat menarik jika kita mengkaji bagaimana suatu konsep yang dianggap sangat signifikan bagi perjuangan rakyat Palestina bisa menjadi mentah begitu saja dalam hitungan beberapa bulan saja.

Pertikaian yang terjadi antara kedua faksi besar palestina yaitu HAMAS *Harakat al-Muqawama al-Islamiyya* yang secara harfiah dapat di artikan “gerakan perlawanan Islam”¹ yang telah berhasil memenangkan pemilihan, yang banyak di anggap dunia internasional sebagai PEMILU paling demokratis yang pernah terjadi di Palestina pada Januari 2006 dan FATAH faksi yang membawa semangat perjuangan ala PLO pada masa kepemimpinan Yasser Arafat yang serba moderat dan tentu saja lebih banyak mendapatkan dukungan dari dunia barat karena kemoderatannya.

Kedua faksi yang sama-sama mengatasnamakan perjuangan rakyat Palestina ini bersepakat untuk bersama-sama memerintah Palestina dengan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional.

¹ *Palestine Profile*, (Diakses 26 Juni 2007), <http://www.Wikipedia.or.id>

Kesepakatan yang merupakan kompromi politik yang disponsori oleh Arab Saudi dan beberapa negara Arab, antara 2 faksi besar di Palestina yaitu HAMAS dan FATAH merupakan bentuk adanya niatan baik dari kedua kubu yang selama ini bertikai dan terkesan saling bersaing untuk sama-sama memegang kekuasaan di Palestina. Hal ini kemudian dianggap sebagai prestasi politik tersendiri dari HAMAS sebagai pihak pemenang Pemilu Demokratis di Palestina sekaligus dianggap menjadi sebuah solusi terbaik untuk mengakhiri krisis internal Palestina yang pasca kemenangan HAMAS semakin lama semakin menjurus kepada tindak kekerasan yang akan melahirkan pertumpahan darah di Palestina sendiri dan juga sebagai jalan untuk kembali membuka pintu untuk terciptanya perundingan damai Israel-Palestina yang sempat tertutup total pasca kemenangan Hamas.

Walaupun hanya bertahan selama 3 bulan saja karena banyaknya Hambatan yang timbul dari berbagai macam Faktor. Fenomena yang terjadi diatas menjadi kajian yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan ilmiah yang menulis tentang hal ini, walaupun ada berupa artikel dan jurnal atau berbentuk berita yang belum tersusun secara runtut. Karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sehingga dapat menjadi sebuah tulisan ilmiah yang bisa di pertanggung jawabkan dengan mengangkat judul **“Berbagai Hambatan Terhadap Pemerintahan Persatuan Palestina 2007”**

B . Latar belakang masalah

Tidak pernah diduga sebelumnya kondisi Palestina menjadi terbagi dua, pasca pecahnya Pemerintahan Persatuan yang belum lama terbentuk, Tepi Barat yang di kuasai oleh FATAH, sedangkan HAMAS memegang kendali atas Jalur Gaza². Dalam sejarah Palestina, memang selalu terjadi perselisihan. Zaman PLO dibawah Yasser Arafat pun hal ini tetap terjadi, hanya saja dengan kepemimpinannya, semua konflik internal tidak pernah sampai mengakibatkan pecahnya Palestina menjadi 2 bagian. Seperti pasca runtuhnya Pemerintahan Persatuan, dimana hal ini akan lebih menyulitkan tujuan bangsa Palestina yang ingin memerdekakan diri dari Israel.

Hal ini seolah mengulang kembali ke masa sebelum Israel berdiri pada 1948, ketika Jalur Gaza masih di kuasai oleh Mesir dan Tepi Barat dikuasai oleh Jordania. Kemudian pada perkembangan selanjutnya Mesir melepaskan klaimnya terhadap Jalur Gaza untuk diserahkan menjadi wilayah Palestina-Arab, sebagai wilayah yang perlu diperjuangkan melawan Israel, begitu pula Jordania mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh Mesir pada saat itu.

Banyak harapan yang mengiringi terbentuknya Pemerintahan Persatuan Palestina yang merupakan bentuk politik internasional yang sangat cerdas dari Arab saudi, di dukung oleh Mesir, Jordania dan juga di dukung oleh beberapa negara Arab moderat lainnya untuk membuka komunikasi antara Israel-Palestina-Negara Arab-Barat untuk menggerakkan proses perdamaian yang sempat terhenti ketika Hamas memenangkan Pemilu pada 25 Januari 2006 lalu.

² TB Silalahi, *"Terobosan menuju negara Palestina"*, Kompas, Rabu 11 Juli 2007

Secara Umum Tujuan terbentuknya pemerintahan koalisi adalah

1. Meredam eskalasi Konflik Horizontal di antara para pendukung faksi HAMAS dan FATAH.
2. Membuka kesempatan kembali terhadap proses perdamaian antara Palestina-Israel yang sempat terputus Pasca HAMAS berkuasa.
3. Memperbaiki keadaan politik dan perekonomian Palestina, yang menjadi lebih buruk pasca 1 tahun HAMAS berkuasa.
4. Untuk kembali mengambil simpati komunitas Internasional terhadap konflik yang sedang terjadi .

Kecuali Amerika Serikat dan Israel tentunya, masyarakat Arab, juga dunia Islam pada umumnya termasuk Indonesia sangat berharap dan memberikan respon positif terhadap terbentuknya Negara Persatuan Palestina, agar memunculkan terciptanya alternatif perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, walaupun pada hakekatnya bentuk yang mirip dengan bentuk negara persatuan itu harusnya telah terbentuk ketika semua faksi di Palestina menandatangani Piagam Nasional yang disepakati pada 27 Juni 2006³, yang di antara salah satu isinya adalah membentuk sebuah Pemerintahan Nasional yang melibatkan semua faksi yang ada di Palestina dan membangun kemitraan politik.

Tapi pada kenyataannya memang HAMAS dan FATAH lah yang mendominasi sehingga faksi-faksi lain tampaknya menjadi seolah terpinggirkan dari perebutan kekuasaan politik di Palestina. Kebersediaan HAMAS sebagai

³ Ni nok Leksono, "Mengubah wajah Timur Tengah" *Kompas*, Juni 4, 2007, Hal 39

faksi yang berhak untuk memegang tampuk kekuasaan pemerintahan untuk menyelesaikan lima tahun mandat kekuasaannya di palestina karena kemenangan pada 25 Januari 2006, untuk berbagi kekuasaan dengan dengan faksi FATAH.

Keputusan yang diambil setelah tekanan yang begitu besar baik itu dari dalam maupun dari luar Palestina sendiri. Tekanan yang benar dirasakan oleh Hamas karena kebanyakan negara donor yang berasal dari negara-negara barat langsung menghentikan bantuannya atau setidaknya meminimalkan bantuan yang secara rutin telah mereka berikan kepada Palestina bahkan sejak sebelum HAMAS berkuasa.

Hal ini terjadi ketika HAMAS secara resmi mengumumkan bentukan Kabinet Pemerintahan barunya. Belum lagi tekanan internal seperti munculnya gelagat untuk terjadinya konflik di internal elite Palestina sendiri sangat besar, mengingat faksi FATAH dengan PLO nya merupakan faksi yang cukup banyak memiliki pendukung, baik itu pendukung di tingkatan lokal Palestina sendiri, maupun di tingkatan Internasional, beberapa negara donor maupun negara Arab.

Hal ini baik langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang bisa saja berujung pada perang saudara, karena di dalam tingkatan elit HAMAS-FATAH sendiri, banyak kekuatan bersenjata dari kedua belah pihak yang sama sekali tidak setuju dengan keputusan pembentukan Pemerintahan koalisi ini. Di samping hal-hal ini ada berbagai macam pertimbangan lainnya yang membuat HAMAS menyetujui pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional bersama faksi FATAH.

Terbentuknya Kabinet persatuan sebagai suatu bentuk pemerintahan Nasional Palestina, ternyata tidak serta merta membuat kelonggaran yang diinginkan dan menjadi alasan utama bersedianya HAMAS untuk berbagi kekuasaan dengan FATAH itu datang. Munculnya Ketakutan berlebihan dari negara-negara donor akan jatuhnya bantuan yang selama ini diberikan kepada kubu Fatah untuk di gunakan sebagai penunjang kehidupan rakyat Palestina, ditakutkan akan jatuh ke tangan HAMAS. Hal yang kemudian terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan pengurangan bantuan terhadap pasukan yang loyal terhadap Mahmmod Abbas dari 86 juta dollar AS menjadi 50 juta dollar AS.⁴ Hal ini banyak dinilai memberikan dampak tidak sehat bagi Pemerintah koalisi yang dibangun, karena mengganggu tatanan keamanan yang telah lebih dulu eksis di Palestina, baik itu sebelum HAMAS berkuasa maupun setelah HAMAS berkuasa.

Negara mediator juga seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB yang tetap menuntut agar Palestina dibawah Pemerintahan Nasional untuk mengakui Israel, tidak menyerang Israel dan tetap mengakui perjanjian yang sudah pernah dilakukan dengan PLO, tuntutan yang di kenal sebagai 3 prinsip kuartet itu malah menimbulkan benih perpecahan di antara 2 elemen utama pembentuk Pemerintahan Koalisi HAMAS-FATAH, karena presiden Mahmoud Abbas digambarkan sebagai wakil FATAH bisa cukup bertoleransi dengan permintaan itu, sedangkan dari kubu HAMAS Perdana Menteri Ismail Haniya secara tegas menolak syarat yang diajukan tersebut, karena hal itu sangat amat

⁴ Trias Kuncahyono, "jalan baru penyelesaian Konflik Palestina", *Kompas*, Kamis 22 Maret 2007

prinsipal dan merupakan landasan utama perjuangan HAMAS dari awal terbentuknya.

Benih perpecahan lain juga di lakukan oleh Israel, memperuncing suasana, dengan hanya mau berhubungan dengan kubu FATAH saja dan seolah tetap tidak mengakui Eksistensi HAMAS dalam Roda Pemerintahan. Tidak bisa diterimanya HAMAS oleh Negara-negara Barat karena salah satunya tidak bersedianya HAMAS untuk mengakui keberadaan Israel yang sudah lama menduduki Palestina. Sejak itu otomatis pemboikotan secara ekonomi dan politik pun bergiliran menghantam Pemerintahan HAMAS, yang dilakukan Negara-negara Barat membuat Pemerintahan HAMAS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ismael Haniya menjadi sangat sulit untuk berjalan efektif. Hanya bergantung dari bantuan-bantuan kemanusiaan yang nilainya mencapai 1,2 miliar dollar AS pada tahun 2006⁵ yang langsung disalurkan tanpa melalui Pemerintahannya.

Rakyat Palestina tetap saja tidak kurang menderitanya. Boikot keuangan yang di lakukan oleh AS dan Israel saja pada waktu itu sudah dapat membuat Pemerintahan Persatuan saat itu tidak mampu membayar gaji pegawai negerinya yang mencapai 112 juta dollar AS per bulan⁶, hal ini tentu saja sangat menekan Pemerintahan saat itu, karena sektor perekonomian secara riil tidak akan mungkin bisa berjalan secara normal di Palestina dengan keadaan seperti itu.

Ditambah lagi banyaknya perbedaan-perbedaan yang tidak dapat di satukan, masalah konsolidasi yang terlihat sangat buruk membuat pembentukan pemerintahan Persatuan seperti tidak memberikan perubahan signifikan bagi

⁵ *Ibid*

⁶ Akhirnya Terbentuk Koalisi Palestina, (Tajuk Rencana, *Kompas*, minggu 23 maret 2007)

rakyat Palestina. Dari awal, di tingkatan elit sendiri memang banyak perbedaan pendapat tentang persetujuan yang di lakukan di Mekah yang di mediasi oleh Arab Saudi dibawah Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang kemudian selanjutnya melahirkan konsep pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari FATAH-HAMAS. Meski dikalangan politisi HAMAS sendiri sedikit banyak menyiratkan adanya keinginan untuk bekerjasama dengan FATAH dan Mahmoud Abbas untuk membukakan pintu perdamaian dengan Israel, tetapi di tingkatan kelompok bersenjata HAMAS adalah mustahil untuk melakukan hal itu, karena dari awal di nilai banyak perbedaan yang sangat Prinsipil di antara kedua Kubu tersebut.

Ketika pengaruh kelompok bersenjata ini lebih kuat, maka akhirnya pecahlah bentrokan bersenjata didalam tubuh negara Persatuan itu sendiri antara kekuatan bersenjata HAMAS dan FATAH yang di anggap tidak hanya oleh para pendukung HAMAS namun juga sebagian besar rakyat Palestina sebagai kolaborator Israel dan AS, yang semuanya berawal dari Jalan-jalan di jalur Gaza dan tepi barat sayap-sayap militer kedua kubu semakin lama semakin meningkatkan intensitas kerusuhan, yang selanjutnya merembet kembali kearah Rivalitas anatar faksi yang sebelumnya telah sedikit didinginkan dengan terbentuknya Pemerintahan Persatuan.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang kemudian muncul adalah **"Apa yang menjadi Faktor Penyebab Gagalnya pemerintahan koalisi HAMAS - FATAH ?"**

D. Kerangka pemikiran /landasan teori

Untuk menjelaskan fenomena Munculnya Hambatan terhadap negara Persatuan Palestina yang didirikan setelah 1 tahun hamas memerintah, Penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan. Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah salah satu dari jenis Konsep Koalisi menurut Arend Lijphart

Teori Koalisi

Defenisi Koalisi menurut Morgan Donovan⁷ *Coalition: an assembly of various factions that unite to form a stronger alliance for mutual action* Koalisi Merupakan konsekuensi logis dalam sebuah sistem politik modern.

Menurut Arend Lijphart, dalam suatu pemerintahan parlementer suatu koalisi akan terbentuk ketika tidak terdapat satu partai mayoritas yang menguasai Parlemen, maka partai-partai minoritas kemudian akan berkoalisi untuk membentuk kabinet. Tetapi koalisi dapat pula terjadi ketika partai mayoritas memutuskan untuk berkoalisi dengan satu atau beberapa partai lain dengan alasan-alasan tertentu untuk kemudian membentuk kabinet⁸.

Koalisi dalam transisi Pemerintahan di Palestina dengan situasi Tekanan yang sangat besar terhadap HAMAS sebagai penggerak roda pemerintahan Palestina sebelumnya menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Tetapi sekaligus koalisi merupakan sesuatu yang membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor politik, ideologi yang cukup tajam tentu membutuhkan koalisi. Hanya saja

⁷ *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990.* Oxford: Oxford University Press

⁸ *Patterns of Democracy: Government Forms & Performance in Thirty-six Countries.* New Haven: Yale University Press, 1999 Hal 91-92

tidak cukup koalisi dimaknai hanya sebatas “pertemanan”, manifestasinya ialah kerjasama. Biasanya untuk memenangkan suara mayoritas, dan terbatas pada kepentingan pragmatis semata saja. Padahal hakikat koalisi adalah tuntutan mutlak dengan tujuan Utama⁹

1. untuk mengembangkan eksekutif yang kuat (*strong*),
2. mandiri (*autonomous*),
3. Tahan lama (*durable*).

Prakteknya, kadang malah sebaliknya. Eksekutif yang lemah, kemandiriannya sangat diragukan, dan cenderung mudah “bubaran-baikannya” layaknya pertemanan. Kadang berkoalisi (baik), kadang pula menarik diri untuk oposisi (bubaran). Eksekutif pun rentan untuk dilengserkan oleh elit tandingannya dengan senang hati.

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika¹⁰ dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Teori koalisi juga menjabarkan tidak semua, Parpol atau Faksi layak untuk di jadikan anggota koalisi oleh faksi atau Partai lain. Hanya Faksi-faksi tertentu yang dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai. Konsep teori koalisi yang di kemukakan oleh Arend Lijphart menghasilkan 5 teori dasar¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Opcit* 8

¹¹ Arend Lijphart, *Democracies : Pattern of Majoritarian and consensus Government in twenty one centuries*, hal 47-50

a. *Minimal Winning Coalition*

Teori ini menerangkan koalisi yang terjadi adalah koalisi 2 Partai atau lebih. Partai yang jadi pemenang sehingga menguasai mayoritas kursi di Parlemen, namun juga “minimal “ dalam artian koalisi ini juga melibatkan partai-partai yang di anggap tidak penting, dalam upaya menggapai mayoritas power.

Pada dasarnya teori ini adalah memaksimalkan kekuasaan dengan sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu, Karena hanya akan mengurangi bagian dalam kabinet, pembentukan koalisi ini juga tanpa memperdulikan posisi partai dalam spektrum ideologi, sehingga perbedaan ideologi yang biasanya menjadi dasar sama sekali tidak di permasalahan.

b. *Minimal size Coalitions*

Prinsip dasar dari teori ini adalah memaksimalkan kekuasaan partai dan memperkecil mayoritas parlemen. Partai dengan suara terbanyak, akan mencari partai yang lebih kecil untuk hanya sekedar mencapai suara mayoritas. teori ini juga tidak memerdulikan spektrum ideologi yang harus sama atau mempunyai sudut pandang yang hampir sama atas suatu masalah. Di sini perbedaan dalam hal itu semua tidak masalah.

c. Bergaining Proposition

Teori koalisi yang hanya melibatkan jumlah partai yang paling sedikit di banding dengan jumlah partai yang berkoalisi dengan teori koalisi yang lain. Prinsip dasarnya adalah teori koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar serta mudah untuk dipertahankan dan banyak hal lain yang kemudian dapat di seimbangkan, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Koalisi. Di lingkup bergaining Proposition, adalah menciptakan suatu Koalisi yang di pandang akan memberikan Dampak lebih baik di bandingkan jika tidak terjadinya Koalisi.

d. Minimal Range Coalitions

Teori ini membuat asumsi yang masuk akal bahwa akan lebih mudah untuk membentuk dan mewujudkan koalisi antar partai yang mempunyai preferensi politik yang serupa, di banding antar partai yang preferensi dasar dari teori koalisi ini adalah memiliki kemiripan program dan kebijaksanaan serta memiliki kedekatan pada pada kecenderungan ideologis yang sama.

Dari ke empat teori yang di kemukakan oleh Arend Lijphart ini yang paling mendekati untuk menjelaskan pembentukan kabinet palestina bersatu yang menjadi tanda terbentuknya pemerintahan persatuan Palestina adalah teori Koalisi : *Bergaining Proposition*, HAMAS sebagai pemenang yang mengalahkan faksi-faksi lain secara telak lewat Pemilu, bersedia HAMAS berbagi kekuasaan dan kursi di kabinet nya dengan FATAH sebagai faksi yang sama sekali tidak menang

di karenakan beberapa alasan rasional dan juga penilaian terhadap bergain position FATAH di palestina juga di mata Dunia Internasional, karena bagaimanapun reputasi FATAH di kancah internasional harus diakui memang lebih bagus daripada HAMAS.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah preposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung oleh fakta empiris. Hipotesa yang ada hanya merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.¹² dari uraian di atas maka hipotesa yang bisa di capai adalah bahwasanya. Hambatan-hambatan yang muncul terhadap pemerintahan Persatuan Nasional Palestina baik itu yang bersifat Internal maupun eksternal.

1. Internal Palestina

- a. Beberapa elemen di tubuh HAMAS maupun FATAH sendiri, pada dasarnya tidak menyetujui pembentukan Pemerintahan koalisi dengan FATAH.
- b. Baik HAMAS maupun FATAH tidak terlalu mendapatkan keuntungan signifikan dari terbentuknya pemerintahan Koalisi.

2. Faktor eksternal: Tidak berkurangnya tekanan besar dari Dunia

Internasional, dan makin memunculkan benih konflik antara Faksi-HAMAS dan Faksi FATAH didalam Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina

¹² Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 141

F. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penulisan ini dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji dan tidak terjadi penyimpangan oleh karena itu penulis membatasi waktu penelitian dari sejak Pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina pada 24 Maret 2007.

Yang ditandai dengan pembentukan kabinet persatuan nasional yang terdiri dari HAMAS-FATAH. Sampai dengan penyingkiran HAMAS dari kabinet, yang ditandai dengan Pemecatan sepihak PM Haniya dari Faksi HAMAS oleh Presiden otoritas Palestina Mahmoud abbas dari Fakasi FATAH dan dengan pecah dan terbagi 2 nya palestina secara *de facto* yang kemudian membawa HAMAS menguasai Jalur Gaza dan FATAH menguasai Tepi Barat pertengahan bulan Juli 2007. Penelitian ini akan mengkhususkan pada Aspek Politik yang memeberikan hambatan signifikan pada jalannya pemerintahan persatuan Palestina hingga berhasil membubarkan Kabinet persatuan tersebut.

G. Metode pengumpulan data dan analisis

Penulisan karya ilmiah ini bersumber dari data yang diperoleh dari buku-buku, situs-situs resmi dan tidak resmi, siaran berita televisi baik lokal atau internasional jurnal-jurnal, dan berbagai surat kabar, Majalah baik versi cetak maupun elektronik yang berasal dari jaringan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat normative dan aturan baku penulisan skripsi, diantaranya adalah Alasan Pemilihan Judul yang berisi tentang mengapa hal tersebut dijadikan sebagai permasalahan di dalam skripsi yang akan ditulis; Latar Belakang berisi gambaran masalah yang akan dijadikan penelitian; Rumusan Permasalahan berisi tentang permasalahan apa yang akan dibahas; Landasan Teoritik yakni alat untuk menganalisa permasalahan; Hipotesa memuat jawaban umum dalam skripsi ini; Jangkauan Penelitian memuat batasan waktu dari permasalahan yang akan dibahas; Metode Pengumpulan dan Analisis data memuat cara-cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

Bab II, Membahas tentang sejarah singkat dari HAMAS dan bagaimana Popularitas HAMAS bisa mengantarkan hamas pada Kemenangan Pemilu Legislatif di Palestina, Sejarah singkat Fatah dan Kiprahnya di dunia Perpolitikan Palestina.

Bab III, Koalisi HAMAS-FATAH dalam kerangka pemerintahan persatuan ,apa saja yang terjadi dalam 3 Bulan pemerintahan Koalisi

Bab IV, mencoba menguraikan tentang berbagai macam Hambatan dan penyebab nya yang timbul di sekitar pemerintahan koalisi persatuan Nasional Palestina

Bab V. akan berisi kesimpulan dan merupakan bab akhir dari skripsi ini.